

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan Outcome/ Output	Target Outcome/Output Tahunan	Alokasi Anggaran	Target Periodik							
							TW 1	TW 2	s.d. Smt.1	TW 3	s.d. TW 3	TW 4	s.d. Smt. 2	Tahunan
SS.1	Meningkatnya kapabilitas Instansi Pemerintah dalam Manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi	IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik	Persentase Instansi Pemerintah	51,8	088.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Rp65,228,636,000,-	6.25%	19.69%	19.69%	34.53%	34.53%	51.80%	51.80%	51.80%
	Kegiatan Pendukung IKU 1	I	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Manajemen ASN Instansi Pemerintah sesuai prinsip meritokrasi	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	4 Laporan		1 Laporan Periodik	1 Laporan Periodik		1 Laporan Periodik				1 Laporan Tahunan
SS.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital	IKU.2	Nilai reformasi birokrasi BKN	Nilai	83	088.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp732,914,355,000,-	81* (hasil penilaian mandiri)	82* (hasil penilaian mandiri)	82* (hasil penilaian mandiri)	82.5* (hasil penilaian mandiri)	82.5* (hasil penilaian mandiri)	83	83	83
	Kegiatan Pendukung IKU 2	I	Penyusunan Dokumen Kepka BKN Tentang Roadmap RB BKN 2025-2029	Dokumen	1 Kepka BKN Tentang Roadmap RB					1 Kepka BKN Tentang Roadmap RB				
		II	Melaksanakan Penilaian Mandiri untuk Indikator RB General	Laporan	3 Laporan		1 Laporan Periodik	1 Laporan Periodik		1 Laporan Periodik				

Jakarta, 19 Februari 2025
Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN RINCIAN TARGET KINERJA BKN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan Outcome/ Output	Target Outcome/Output Tahunan	Keterangan
IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik	Persentase Instansi Pemerintah	51,8%	<p>Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan KASN pada tahun 2024, instansi yang menerapkan manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi yang memperoleh kategori Sangat Baik sebanyak 95 instansi dan Instansi Pemerintah yang memperoleh kategori Baik sebanyak 236 instansi (total 331 instansi). Menyesuaikan proses penyusunan instrumen penilaian penerapan sistem Merit yang dilaksanakan Kementerian PAN RB, maka pada tahun 2025 Badan Kepegawaian Negara akan melakukan evaluasi penerapan sistem merit instansi melalui proses pengawasan dan pengendalian preventif ataupun represif terhadap pelaksanaan Manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi pada 331 dari 640 (51,8%) instansi pemerintah berkategori minimal baik.</p> <p>Bentuk pengawasan dan pengendalian preventif dilakukan melalui pengeluaran produk pertimbangan teknis, rekomendasi, persetujuan atas rencana, dan rekomendasi atas hasil. Sementara pengendalian represif dilakukan melalui tindakan administratif berbentuk pemblokiran akses SIASN. Pengawasan dan pengendalian terhadap 51,8% (331 dari 640) instansi ini dilakukan secara bertahap, yaitu kepada 40 instansi pada triwulan I, 86 instansi pada triwulan II, 95 instansi pada triwulan III, dan 110 instansi pada triwulan IV. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2025, penerapan sistem merit pada pelaksanaan manajemen ASN 331 instansi dengan kategori minimal baik ini dapat tetap terpantau.</p>
Kegiatan Pendukung IKU 1	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Manajemen ASN Instansi Pemerintah sesuai prinsip meritokrasi	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	4 Laporan	<p>Output berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Laporan periodik pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan manajemen ASN sesuai prinsip merit secara bertahap terhadap 331 instansi yang memiliki kategori minimal baik triwulan 1-3 - 1 laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan manajemen ASN sesuai prinsip merit terhadap 331 instansi yang memiliki kategori minimal baik
IKU.2	Nilai reformasi birokrasi BKN	Nilai	83	<p>Nilai Reformasi Birokrasi BKN pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 81,15. Nilai Reformasi Birokrasi ini diperoleh juga dari beberapa indikator yang merupakan komposit, seperti Indeks Maturitas SPBE BKN, Indeks Pelaksanaan RB BKN, Nilai Pelaksanaan Sistem Merit, dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang secara umum mengalami peningkatan secara signifikan. Oleh karena itu BKN optimis dapat meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dan menetapkan target sebesar 83 di tahun 2025.</p> <p>Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui dua rencana aksi utama pada tahun 2025, yaitu penyusunan Roadmap RB BKN 2025-2029 yang dituangkan di dalam dokumen Keputusan Kepala BKN, serta pelaksanaan RB General yang akan dimonitor melalui penilaian mandiri setiap periode triwulan. Penilaian mandiri ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana aksi setiap indikator RB general dan memantau hal-hal yang dapat menjadi penunjang kenaikan nilai RB BKN.</p> <p>Target nilai penilaian mandiri setiap triwulan ditentukan secara bertahap, yaitu 81 pada triwulan I, 82 pada triwulan II, dan 82,5 pada triwulan III. Pada setiap laporan penilaian mandiri, akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan RB general yang akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya. Diharapkan BKN mencapai nilai RB sebesar 83 pada hasil penilaian RB oleh Kementerian PAN RB di akhir tahun 2025.</p>
Kegiatan Pendukung IKU 2.1	Penyusunan Dokumen Kepka BKN Tentang Roadmap RB BKN 2025-2029	Dokumen	1 Kepka BKN Tentang Roadmap RB	Output berupa: Roadmap RB BKN 2025-2029 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala BKN
Kegiatan Pendukung IKU 2.2	Melaksanakan Penilaian Mandiri Indikator RB General	Laporan	3 Laporan	Output berupa: Laporan penilaian mandiri RB General periodik setiap triwulan yang dilaksanakan oleh BKN. Sementara untuk hasil akhir, akan dilihat berdasarkan laporan tahunan penilaian RB BKN dari Kementerian PAN RB